

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH (JAMKESDA) DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAYONG UTARA

Hartatik efendi

Program Studi Ilmu Pemerintahan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura
dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat

E-mail : efendi_hartatik@yahoo.com

Abstrak

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk menghasilkan sebuah kajian evaluasi suatu pelaksanaan program kesehatan guna mencapai derajat kesehatan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Judul skripsi ini diangkat berdasarkan permasalahan bahwa di Kabupaten Kayong Utara masih saja terdapat masyarakat yang belum mengetahui mengenai Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Lokasi Penelitian di Dinas Kesehatan Kabupaten Kayong Utara. Hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa masih saja terdapat masyarakat yang belum memenuhi syarat sebagai peserta Jamkesda dan kurangnya sosialisasi Program Jamkesda oleh petugas kesehatan kepada masyarakat dan kurang cekatnya petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan. Kendala lain yang menjadi permasalahan ialah belum adanya fasilitas Rumah Sakit Umum daerah sebagai sarana masyarakat mendapat pelayanan yang lebih baik dan lebih tepat. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi yang lebih sering kepada masyarakat mengenai Program Jamkesda dan agar petugas kesehatan yang lebih cekatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Kata Kunci : Evaluasi Program, Jamkesda, Pelayanan Kesehatan

Abstract

This Thesis is intended to bring out an evaluation study of the implementation of health programme in order to achieve the level of health is suitable with the goals that want to be attained. This title of this thesis is based on issues raised in the District of North Kayong that there are real people who do not know about the Area Health Assurance Program (Jamkesda). This study used a qualitative approach with descriptive research. The research site in the Health Department of North Kayong. The result of the research that has been done shows that there are real people who do not qualify as participants of Jamkesda and lack of socialization by officers to the community and less defly health workers in delivering health service. Others constraints, the problem is the lack of facilities General Hospital as a regional community facilities got better service and more precise. Therefore, it's need to socialize more often to the community about Jamkesda Programme and the health workers are more expert onto service to the community.

Keywords : The Evaluation Program, Area Health Assurance (Jamkesda), Health Care

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Penelitian

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial.

Untuk mencapai tujuan nasional tersebut diselenggarakanlah upaya pembangunan yang berkesinambungan yang merupakan suatu rangkaian pembangunan yang menyeluruh terarah dan terpadu, termasuk di antaranya pembangunan kesehatan. Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan pembangunan kesehatan sebagai komitmen nasional yaitu untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Upaya-upaya yang dilakukan Pemerintah untuk mengatasi persoalan

pelayanan kesehatan diantaranya adalah dengan membuat regulasi yang salah satunya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Selain itu dalam rangka pemerataan pelayanan kesehatan, Pemerintah mulai menggalakkan program-program yang diarahkan kepada masyarakat kurang mampu sehingga semua masyarakat dapat menikmati pelayanan kesehatan secara adil dan merata. Salah satu program pelayanan kesehatan yang dapat dinikmati oleh masyarakat miskin yaitu jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas). Jamkesmas adalah sebuah program asuransi kesehatan untuk warga Indonesia, program ini dijalankan oleh Departemen Kesehatan sejak tahun 2004. Di Indonesia masih banyak masyarakat miskin yang tidak dapat menyentuh pelayanan kesehatan gratis dan bahkan mereka juga tidak mampu membayar biaya untuk berobat ke Puskesmas.

Pemegang kartu Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di Kabupaten Kayong Utara tercatat lebih dari 48 ribu orang. Kartu Jamkesda diberikan kepada seluruh warga Kayong Utara baik kaya ataupun miskin. Artinya, tanpa terkecuali seluruh masyarakat Kayong Utara telah ditanggung jaminan kesehatannya. Hal ini dalam rangka pelayanan kesehatan gratis yang diterapkan sejak tahun 2009 dan berlaku bagi seluruh warga Kabupaten Kayong Utara. Masyarakat yang diberikan Jamkesda adalah yang tak memiliki Jamkesmas. Pemilik kartu

Jamkesmas di Kabupaten Kayong Utara sebanyak 48.553 orang, dan sekitar 2.000 orang pemegang kartu Askes dari kalangan PNS dan Akabri. Sesuai dengan namanya Jamkesda, program Jaminan Kesehatan Daerah ini merupakan pelayanan kesehatan daerah yang ditujukan kepada masyarakat Kabupaten Kayong Utara dengan memberikan pelayanan kesehatan secara gratis baik berupa rawat jalan, rawat inap, persalinan, dan pelayanan gawat darurat di puskesmas dan jejaringnya serta rawat jalan tingkat pertama, rawat in p tingkat lanjutan di rumah sakit umum daerah.

Pemerintah Kabupaten Kayong Utara melalui Dinas Kesehatan telah menjamin biaya kesehatan secara gratis bagi seluruh masyarakat di daerah ini. Kendati sudah menjamin pembiayaan kesehatan baik melalui Jamkesmas maupun Jamkesda ternyata Dinas Kesehatan masih sering didatangi oleh oknum masyarakat untuk meminta uang penggantian dengan melampirkan kwitansi biaya kesehatan. Kwitansi yang diberikan kepada pihak dinas kesehatan itu sebagian besar adalah kwitansi biaya pengobatan yang dialami oleh masyarakat di rumah sakit dan juga biaya transportasi sejak dari K U ke rumah sakit rujukan. Klaim yang sering disampaikan oleh masyarakat biasanya biaya *speed*, obat dan kamar perawatan di mana sebenarnya untuk biaya itu pemerintah sudah menganggarkan dan dialokasikan ke Jamkesda. Selama ini banyak masyarakat yang merasa mampu untuk berobat di rumah sakit pemerintah tidak puas dengan pelayanan dan obat yang diberikan untuk kelas III seperti yang sudah ditentukan,

sehingga banyak dari mereka yang minta dirawat di kelas II dengan obat-obat yang mereka minta sendiri mereknya.

Dengan kondisi demikian, maka akan terjadi selisih biaya perawatan yang selanjutnya dimintakan kwitansi untuk diklaim kepada Dinas Kesehatan KUU agar diganti dan tanpa menyertakan *copy* resep dari dokter, tetapi jika perawatan pasien naik ke kelas II artinya bukan kewenangan Jamkesda lagi, apalagi Jamkesmas. Selain itu, kasus lain yang sering muncul di Dinas Kesehatan adalah adanya kwitansi transportasi di mana selama ini pemerintah hanya menanggung 4 kursi untuk pasien dan satu kursi untuk pengantar, namun yang terjadi masyarakat berpendapat bahwa yang ditanggung adalah se uanya sehingga sering terjadi klaim kursi tra sportasi yang melebihi dari jumlah yang ditentukan karena biasanya banyak keluarga pasien yang ingin ikut mengantar pasien.

Realitas pelaksanaan pelayanan Jamkesda tergambar jelas dengan adanya perbedaan profesionalitas para aparatur terhadap pelayanan antara pengguna jamkesda dengan pengguna jasa kesehatan lainnya misalnya k rangnya pengetahuan masyarakat mengenai jamkesda yang membuat masyarakat sulit mendapatkan kartu jamkesda, proses pelayanan yang lama dibandingkan dengan pengguna jasa pelayanan kesehatan lainnya hingga hal ini cenderung menyulitkan masyarakat. Selain profesionalitas dari petugas yang kurang baik terdapat petugas informasi yang kurang ramah, kenyamanan ruang tunggu minim dan harga obat yang mahal membuat masyarakat kesulitan dan tidak mau berobat ke

Puskesmas. Sehingga membuat masyarakat lebih cenderung atau senang untuk berobat ke Mantri atau Dukun.

Pola pembiayaan kesehatan di Kabupaten Kayong Utara telah di biyai oleh pemerintah daerah melalui Jamkesda dimana semua masyarakat Kabupaten Kayong Utara dalam mendapatkan pelayanan tidak di pungut biaya (gratis). Adapun bentuk jaminan pemeliharaan kesehatan di kabupaten Kayong Utara selain yang di tanggung oleh Jamkesda antara lain jamkesmas, askes dan jamsostek sampai dengan tahun 2011 jumlah peserta jaminan kesehatan pra bayar di Kayong Utara sebanyak 998.785 orang atau mencapai 101,37 % dari jumlah penduduk Kayong Utara sebanyak 97.449 Jiwa. Sebagian besar peserta jaminan kesehatan pra bayar adalah peserta Jamkesda (46,76 %), Jamkesmas (49,82 %) dan Askes (4,79 %). Jumlah peserta jaminan kesehatan yang ada di Kabupaten Kayong Utara tahun 2011 sebanyak 98.785 peserta yang terdiri dari 48.553 peserta Jamkesmas , 45.565 peserta jamkesda dan 4.667 peserta Askes dengan persentase keseluruhan s besar 101,37 %, tingginya jaminan kesehatan di Kabupaten Kayong Utara tahun 2011 melebihi jumlah penduduk yang ada sebanyak 97.449 jiwa di sebabkan karena banyak peserta Askes / PNS yang terdaftar di wilayah kabupaten Kayong Utara tetapi bertempat tinggal di Kabupaten lain sehingga tidak termasuk dalam data kependudukan di Kabupaten Kayong Utara.

Pelaksanaan kebijakan pelayanan Jamkesda merupakan tanggung jawab Pemerintah dalam merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina dan mengawasi

penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau untuk masyarakat. Juga sumberdaya dibidang kesehatan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Pemerintah bertanggungjawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui sistem Jaminan Sosial Nasional bagi upaya kesehatan perseorangan.

Berdasarkan atas pemikiran-pemikiran diatas maka penulis mengajukan penelitian dengan judul “Evaluasi Pelaksanaan Progra Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA) di Dinas Kesehatan Kabupaten Kayong Utara”, yang diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi para pihak yang peduli pada pencapaian pelaksanaan program kesehatan demi tercapainya derajat kesehatan yang merata untuk masyarakat.

2. Rumusan Permasalahan

Untuk mencapai derajat kesehatan yang serringgi-tinggi ya, sangat diperlukan perhatian dan ta ggung jawab dari Pemerintah terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan bersubsidi. Masyarakat merupakan komponen yang sangat penting dalam pencapaian tujuan dan hasil dari pelakasanaan kebijakan pelayanan kesehatan bersubsidi. Oleh karena itu penulis membatasi permasalahan dengan lingkup sebagai berikut “Bagaimanakah Evaluasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat di Dinas Kesehatan Kabupaten Kayong Utara?”.

3. Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah :

1. Ingin mengetahui / mendeskripsikan dan menganalisis apakah pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesda) di Dinas Kesehatan Kabupaten Kayong Utara sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan?
2. Ingin mengetahui / mendeskripsikan dan menganalisis apakah pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di Dinas Kesehatan Kabupaten Kayong Utara sudah memberikan hasil yang diinginkan atau tidak?

4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan yaitu :

1. Secara teoritis, diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan, yaitu berkaitan dengan disiplin Ilmu Pemerintahan. Selain itu, dapat dijadikan sebagai rujukan bagi peneliti lain untuk meneliti lebih lanjut mengenai permasalahan yang sama.
2. Secara praktis, diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara maupun pihak-pihak terkait dalam melakukan perbaikan pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Masyarakat selanjutnya.

B. KERANGKA TEORI DAN METODOLOGI

1. Kerangka Teori

Evaluasi berasal dari kata Bahasa Inggris “*evaluation*” yang diserap dalam perbendaharaan istilah Bahasa Indonesia

dengan tujuan mempertahankan kata aslinya dengan sedikit penyesuaian lafal Indonesia menjadi “*evaluasi*” yang dapat diartikan memberikan penilaian dengan membandingkan sesuatu hal dengan satuan tertentu sehingga bersifat kuantitatif. Pengertian evaluasi yang bersumber dari kamus *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English* evaluasi adalah *to find out, decide the amount or value* yang artinya suatu upaya untuk menentukan nilai atau jumlah. Selain arti berdasarkan terjemahan, kata -kata yang terkandung dalam definisi tersebut menunjukkan bahwa kegiatan evaluasi harus dilakukan secara hati-hati, bertanggung jawab, menggunakan strategi dan dapat dipertanggung jawabkan (Arikunto, 2004:1).

Selanjutnya Dunn (1998 : 608) mengemukakan bahwa istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*) dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti satuan nilai. Dalam arti yang spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan. Evaluasi mempunyai fungsi memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan atau program, dalam hal ini mengungkap seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu dan target tertentu telah dapat dicapai.

Hogwood (dalam Abidin 2004:20) melihat evaluasi dalam hubungan dengan masyarakat yang diharapkan terjadi sebagai dampak atau *outcomes* dari suatu kebijakan. Dampak dari kebijakan tidak selalu sama seperti yang direncanakan semula. Ini berhubungan dengan ketidakpastian

lingkungan dan kemampuan administrasi dalam melaksanakan suatu kebijakan. Dalam praktek selalu ada keterbatasan untuk memahami sesuatu isu secara utuh. Sementara itu juga perlu disadari bahwa kebijakan pemerintah bukanlah satu-satunya kekuatan, melainkan hanya salah satu dari sekian banyak kekuatan yang mempengaruhi perubahan dalam masyarakat. Sebab itu, suatu kebijakan tidak boleh merasa cukup sekedar berakhir hanya pada selesainya pelaksanaan saja, sebelum ada evaluasi akhir atas dampak yang dihasilkan. Hal ini dapat dipahami mengingat ada perbedaan antara hasil langsung berupa target yang dihasilkan suatu kebijakan (*policy outputs*) dengan dampak yang diharapkan terjadi dalam masyarakat (*policy impact*). Karena itu, sekalipun evaluasi mencakup keseluruhan proses kebijakan, fokusnya adalah penilaian atas dampak atau kinerja (*outcomes*) dari suatu kebijakan.

Kayatamo (1985:162) yang mengatakan bahwa program adalah rangkaian aktifitas yang mempunyai saat permulaan yang harus dilaksanakan serta diselesaikan untuk mendapatkan suatu tujuan. Dilaksanakannya suatu program tidak hanya menyiratkan rencana yang kongkrit, akan tetapi diimbangi dengan budget/anggaran program tersebut. Selanjutnya dapat dilihat dalam pengertian program yang dikemukakan oleh Westra, dkk (1989:236) : “ Program adalah rumusan yang memuat gambaran pekerjaan yang akan dilaksanakan beserta petunjuk cara-cara pelaksanaannya. Hal ini dapat dilihat bahwa program tidak saja tercantum tujuan kebijaksanaan serta tindakan, prosedur atau

aturan-aturan tetapi disertai pula dengan budget atau anggaran.

Selain itu, adapun definisi program yang termuat dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengatakan bahwa :

“ Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran , atau masyarakat yang dikordinasikan oleh instansi masyarakat.”

Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa program adalah suatu jenis rencana yang kongkret karena di dalamnya sudah tercantum sasaran, kebijaksanaan, prosedur anggaran, dan waktu pelaksanaan.

Menurut Mannulang (1987:1) yang mengatakan bahwa, s.bagai unsur dari suatu perencanaan, program dapat pula dikatakan sebagai gabungan dari politik, prosedur dan anggaran yang dimaksudkan untuk menetapkan suatu tindakan untuk waktu yang akan datang. Siagian (2002) mengatakan bahwa, penyusunan program kerja adalah penjabaran suatu rencana yang telah ditetapkan sedemikian rupa, sehingga program kerja itu memiliki ciri-ciri operasional tertentu.

Langbein (1980:7), mengemukakan tipe-tipe evaluasi kebijakan bahwa ketika semua penelitian evaluasi memperhatikan keberhasilan program dalam bentuk hasil/akibat program, ketika studi lain

berfokus pada proses dengan mana program dilaksanakan. Ketentuan-ketentuan yang perlu diperhatikan untuk keberhasilan evaluasi menurut Langbein yaitu :

1. Metode *Deskriptif*;
2. Metode *Causal*.

Evaluasi proses diarahkan pada seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan sudah terlaksana sesuai dengan rencana. Evaluasi proses menunjuk pada "apa" (*what*) kegiatan yang dilakukan dalam program, "siapa" (*who*) orang yang ditunjuk sebagai penanggung jawab program, "kapan" (*when*) kegiatan akan selesai. Evaluasi proses diarahkan pada seberapa jauh kegiatan yang dilaksanakan di dalam program sudah terlaksana sesuai dengan rencana. Menggunakan metode deskriptif, proses evaluasi mengacu pada pertanyaan-pertanyaan :

1. Apakah program sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan?
2. Fasilitas, sarana dan prasarana apa saja yang digunakan dalam melaksanakan program? Dan bagaimana mereka menggunakannya?

Selanjutnya penelitian dengan menggunakan metode sebab akibat, Evaluasi produk diarahkan pada hal-hal yang menunjukkan perubahan yang terjadi pada masukan mentah. Hasil/outcome yang diharapkan pada penelitian evaluasi kebijakan diharapkan mengacu pada pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

1. Apakah program memberikan hasil yang diinginkan atau tidak?

2. Cara yang bagaimana pelaksanaan program dapat memberikan hasil yang terbaik?

Tanpa evaluasi, kita tidak dapat mengetahui seberapa jauh hasil yang dicapai dari sebuah program. Evaluasi merupakan tahap dimana suatu program dapat diketahui apakah telah berhasil sesuai dengan tujuan program yang sebenarnya atau tidak. Evaluasi juga menghasilkan *feedback* (umpan balik) yang merupakan acuan bagi para perencana program untuk menyusun program baru ataupun untuk meneruskan program yang ada, sehingga kecenderungan yang mengerahan pada kegagalan dapat diminimalisir.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sementara jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Menurut Nazir (1996:63) penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Berdasarkan kondisi tersebut, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan aktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Berangkat dari pendapat tersebut, maka dalam penelitian ini akan berupaya untuk mendeskripsikan berbagai hal menyangkut Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di Dinas Kesehatan Kabupaten Kayong Utara.

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini antara lain: Kepala Dinas, Kepala Bidang Kesga dan Promkes, Kepala Bidang

Yankes Dinas Kesehatan, Kepala Puskesmas Telaga Arum Kecamatan Seponti dan Masyarakat pengguna layanan Jamkesda berjumlah 3 (tiga) orang.

Objek penelitian yang telah diteliti adalah evaluasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan daerah (Jamkesda) di Dinas Kesehatan Kabupaten Kayong Utara.

Kemudian Kegiatan pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam dan dokumentasi.

Selanjutnya teknik yang digunakan dalam menguji keabsahan data pada penelitian ini adalah teknik triangulasi. Dimana data yang diperoleh baik dengan cara wawancara, observasi. Akan di-cross check kemudian dianalisa secara lebih terfokus sehingga akan menghasilkan data yang lebih akurat.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Berdasarkan atas data yang diperoleh dari observasi dan wawancara yang penulis lakukan dalam penelitian lapangan, maka :

Pada dasarnya pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) di Dinas Kesehatan Kabupaten Kayong Utara belum optimal dan belum dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan yaitu sesuai dengan Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Fasilitas, sarana dan prasarana sebagai penunjang Program Jamkesda masih kurang optimal karena masih belum adanya Rumah Sakit Umum Daerah sebagai fasilitas yang

lebih membuat Program Jamkesda ini di rasa kurang dapat memuaskan masyarakat.

Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan daerah (Jamkesda) di Dinas Kesehatan Kabupaten Kayong Utara belum sepenuhnya memberikan hasil yang maksimal, hal ini ditandai dengan kurang cekatannya petugas kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dan klaim perorangan yang diajukan oleh masyarakat atau pasien Program Jamkesda dalam melakukan transaksi biaya kesehatan yang seharusnya tidak ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

Cara Program dalam mencapai hasil ialah dengan evaluasi dan monitoring oleh Tim Dinas Kesehatan yang dilaksanakan secara berkala minimal 6 (enam) bulan sekali.

2. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan penulis dalam melakukan penelitian di Dinas Kesehatan Kabupaten Kayong Utara adalah sebagai berikut:

1. Sulitnya mengetahui data-data mengenai peserta Jamkesda di Kayong Utara.
2. Rusaknya perangkat komputer yang ada sehingga data-data yang tersimpan hilang.
3. Kurangnya waktu untuk melakukan penelitian yang membuat penulis masih sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan serta menganalisis secara lebih mendalam terhadap masalah yang akan diteliti.

3. Apresiasi

Pada kesempatan ini, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran Aparatur Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Kayong Utara yang telah mengizinkan peneliti

untuk melakukan penelitian di tempat tersebut dan telah banyak memberikan bantuan kepada peneliti sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Syukur. 1987. *Studi Implementasi, Latar Belakang, Konsep pendekatan dan Relevansinyadalam Pembangunan*. Makassar : Persadi.
- Anderson, James E. 1997. *Public Policy-Making, Third edition*. New York: Holt, Rinehart and Winston.
- Anderson, Scarvia B & Samuel Ball. 1978. *The Profession and Practice of Program Evaluation*. San Francisco: yossey Bass Publishers.
- Arikunto, Suharsimi. 2004. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan*. Jakarta : Rineka Cipta.
- dan Abdul Jabar, Cepy Safrudin. 2004. *Evaluasi Program pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Dunn, William N. 1998. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Terjemahan Samodra Wibawa. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kayatomo, Sutomo. 1985. *Program Pembangunan*. Bandung : Sinar Baru.
- Langbein, Laura Irwin.1980. *Discovering Whether Programs Work : A Guide To Statistical Methods For Program Evaluation*. California : Goodyear Publishing Company.
- Mannulang, M. 1987. *Dasar-dasar Manajaemen*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Moh. 1996. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nugroho, D. Riant. 2006. *Kebijakan Publik, Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta; Gramedia.
- Patton, Michael Quinn. 1991. *How to Use Qualitative Methods in Evaluation*. SAGE Publications.
- Siagian, Sondang P. 2002. *Teori Pengembangan Organisasi*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tayibnapis, Farida Yusuf . 2000. *Evaluasi Program*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1994. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta : CV. Haji Mas Agung.
- . 1995. *Manajemen Pembangunan*. Jakarta : CV. Haji Mas Agung.
- Westra, Pariata, dkk. 1989. *Ensiklopedia Administrasi*. Jakarta : Gunung Agung.
- Dokumen :**
- Kabupaten Kayong Utara dalam Angka 2012
- Peraturan Bupati Kayong Utara No. 5 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Program Jaminan Kesehatan Daerah Kabupaten Kayong Utara
- Profil Dinas Kesehatan 2012
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- Undang-Undang RI No or 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- Sumber Lain :**
- <http://andripradinata.blogspot.com/2012/10/model-evaluasi-pembelajaran-model-cipp.html> diakses pada tanggal 7 Mei 2013 jam 09.20 WIB
- <http://evaluasipendidikan.blogspot.com/2008/03/evaluasi-program-sebuah-pengantar.html> Diakses pada tanggal 23 mei 2013 jam 22.30 WIB
- <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/19636/6/Cover.pdf> Diakses pada tanggal 23 mei 2013 jam 22.25 WIB

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/14892/1/09E01001.pdf> Diakses pada tanggal 23 mei 2013 jam 22.25 WIB

<http://www.damandiri.or.id/file/muliatyunjbab.pdf> Diakses pada tanggal 23 mei 2013 jam 22.20 WIB

<http://m.equator-news.com/kayong-utara/20130311/angka-penduduk-miskin-tersisa-8000-jiwa> Diakses pada Tanggal 25 Mei 2013 Jam 10.00 WIB





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama Lengkap : HARTATIK EFENDI
NIM / Periode lulus : E42009071/ 2013
Fakultas / Jurusan : FISIP / ILMU ADMINISTRASI
Email address/HP : efendi_hartatik@yahoo.com / 085245486436

demikian pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN DAERAH
(JAMKESDA) DI DINAS KESEHATAN KABUPATEN KAYONG UTARA**

berserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

- fulltext
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Mengetahui/disetujui
Pengelola Jurnal..... 19/10/2014



Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : 20 November 2013

(HARTATIK EFENDI)